IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Tahun 2013 ini merupakan salah satu upaya untuk menyajikan informasi mengenai capaian kinerja instansi, sekaligus bentuk pertanggung jawaban anggaran yang diperoleh PPMKP pada tahun 2013, sebagaimana diatur dalam INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja mengacu pada PERMENPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/ Permentan/ OT.140/ 2/ 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), maka PPMKP melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian, serta fungsional Non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian. Untuk mencapai visinya Menjadi Lembaga Pelatihan yang Menghasilkan Pemimpin dan Pengelola Pertanian yang Profesional, Kreatif, Inovatif, dan Berwawasan Global, PPMKP menyelenggarakan 5 (lima) program untuk mencapai sasaran strategis yang telah disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013.

Program peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian; peningkatan kompetensi ketenagaan pelatihan pertanian; kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi; pelayanan perkantoran yang difasilitasi; serta tersusunnya dokumen, norma, standar pedoman dan kebijkan menjadi program utama yang dilaksanakan PPMKP pada tahun 2013 berhasil mencapai tingkat kinerja **98,55%** dengan predikat **memuaskan**, serta dinyatakan **efisien**, karena *input* yang digunakan sebesar **96%** lebih sedikit dari *output* yang dihasilkan.

Dari kelima program tersebut, secara umum, PPMKP dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target ouput yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat memperoleh capaian kinerja 100%, yaitu pada sasaran "Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian" dengan capaian kinerja rata – rata 92,77%. Tidak tercapainya target output yang sudah ditetapkan akibat dari penghematan APBN sehingga anggaran tidak mencukupi untuk melatih peserta diklat, dan selebihnya karena alasan pribadi sehingga peserta tidak dapat hadir pada pelaksanaan diklat. Pada pelaksanaan mendatang, PPMKP akan berupaya untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak – pihak terkait, agar informasi mengenai pelatihan dapat sampai pada sasaran secara tepat dan akurat.

Pada akhirnya, LAKIP ini diharapkan dapat berkontribusi nyata pada upaya peningkatan capaian kinerja Tahun 2014 dengan mengantisipasi beberapa permasalahan yang telah dihadapi dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh PPMKP.

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang, PERMENPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPMKP berupaya secara terus menerus untuk dan mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima sebagai upaya mewujudkan *Good Governance*. Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini disusun sebagai: 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, 2) penyempurnaan dokuen perencanaan periode yang akan datang, 3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan 4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun yang telah bersungguhsungguh menyelesaikan tugasnya dan juga kepada semua pihak yang sudah membantu dalam pembuatan LAKIP ini.

> Ciawi, 10 Januari 2014 **Kepala Pusat,**

Ir. Kemal Mahfud, MM NIP. 19610225 198903 1 001

DAFTAR ISI

IKHTISAR	EKSEKUTIF	 i
KATA PEN	IGANTAR	 ii
DAFTAR I	SI	 iii
DAFTAR	ABEL	 iv
DAFTAR (SAMBAR	 ٧
DAFTAR L	AMPIRAN	 vi
BAB I.	PENDAHULUAN	 1
	A. Latar Belakang	 1
	B. Organisasi dan Tugas Fungsi	 2
BAB II.	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 10
	A. Rencana Stratejik (Renstra)	 10
	1. Visi	 10
	2. Misi	 10
	3. Tujuan	 11
	4. Sasaran	 12
	B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	 21
	C. Penetapan Kinerja (PK)	 24
BAB III.	AKUNTABILITAS KINERJA	 27
	A. Akuntabilitas Kinerja	 27
	B. Perkembangan Pencapaian Kinerja Sasaran	 31
	C. Akuntabilitas Keuangan	 37
	D. Analisa efisiensi Capaian Indikator Kineja	 38
BAB IV.	PENUTUP	 40
LAMPIRAI	N	

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
2.1.	Sasaran dan Indikator Kinerja PPMKP Tahun 2010 - 2014	12
2.2.	Rencana Kinerja Tahun 2010 – 2014	17
2.3.	Rencana Kinerja Tahunan (2013)	22
2.4.	Penetapan Kinerja	25
3.1.	Pengukuran Kinerja	28
3.2.	Skala Pengukuran Kinerja	31
3.3.	Capaian Kinerja Sasaran PPMKP	32
3.4.	Hasil Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2013	35
3.5.	Perkembangan Realisasi Serapan Anggaran PPMKP Tahun 2010 s.d. 2013	37

DAFTAR GAMBAR

Tabel		Hal
3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2010 s.d. 2013	12

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Penetapan Kinerja Tahun 2013
- 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian
- 3. Jumlah Data Pegawai PPMKP per 10 Januari 2014

vi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggunjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan, maka sebagai Unit Pelaksana Teknis Pusat di bawah Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) melaporkan tingkat capaian kinerjanya ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap tahunnya.

Mengacu pada PERMENPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PPMKP berupaya untuk melaporkan pencapaian sasaran strategis beserta target - target yang telah ditetapkan oleh Kepala BPPSDMP dan Kepala PPMKP dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013, dimana kegiatannya dibiayai oleh DIPA PPMKP Tahun Anggaran 2013.

Ditinjau dari posisinya, PPMKP memiliki peran yang strategis dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian baik pada jajaran aparatur yang memberikan pelayan publik, non aparatur sebagai pelaku utama bidang pertanian, dan jajaran pejabat fungsional yang mendukung performa pertanian pada bidang dan keahlian masing-masing.



Oleh karenanya, dengan didukung oleh sumberdaya yang dimiliki, PPMKP berusaha secara terus - menerus meningkatkan kinerja instansi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Untuk meningatkan kualitas *output* diklat yang diselenggarakan di setiap tahunnya, maka PPMKP merasa perlu untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang mencerminkan prinsip – prinsip *Good Governance*. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai kondisi tersebut, maka PPMKP menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) PPMKP Tahun 2013 ini untuk:

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan,
- 2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
- 3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
- 4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Fungsi utama tersebut di atas menjadi pedoman untuk menyusun dan melaporkan pencapaian target kinerja PPMKP selama Tahun Anggaran 2013 dalam LAKIP PPMKP Tahun 2013 ini.

B. Organisasi dan Tugas Fungsi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/ T.140/2/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, PPMKP mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian, serta



fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPMKP mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kerjasama,
- 2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan,
- 3. Pelaksanaan pelatihan manajemen,
- 4. Pelaksanaan pelatihan kepemimpinan,
- 5. Pelaksanaan pelatihan multimedia pertanian,
- Pelaksanaan pelatihan fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian,
- Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian,
- 8. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian,
- Pengembangan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia pertanian, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian,
- Pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian,
- 11. Pengelolaan sarana teknis dan produksi multimedia pertanian,
- Pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan multimedia pertanian serta penyebaran informasi pertanian,



13. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga PPMKP.

2. Organisasi dan Tata Kerja

Organisasi Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Eselon IIa). Organisasi PPMKP terdiri dari: (1) Bagian Umum, (2) Bidang Program dan Evaluasi, (3) Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, (4) Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Multimedia Pertanian, dan (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. Subbagian Keuangan, yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, yang mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bidang Program dan Evaluasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kerjasama, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

 a. Seksi Program dan Kerjasama, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan kerjasama;



 b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Seksi Pelatihan Manajemen, yang mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan manajemen dan fungsional non ilmu hayat pertanian;
- b. Seksi Pelatihan Kepemimpinan, yang mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan kepemimpinan.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Multimedia Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana teknis, produksi, dan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan multimedia pertanian serta penyebaran informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Seksi Sarana Teknis dan Produksi, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana teknis, dan urusan produksi multimedia pertanian, serta urusan perpustakaan;
- b. Seksi Pelatihan Multimedia Pertanian, yang mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelaksanaan dan pengembangan teknik pelatihan multimedia pertanian serta penyebaran informasi pertanian.



5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas antara lain :

- a. Melakukan pelatihan manajemen;
- b. Melakukan pelatihan kepemimpinan;
- c. Melakukan pelatihan multimedia pertanian;
- d. Melakukan pelatihan fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian;
- e. Menyusun bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional ilmu hayat pertanian;
- f. Melaksanakan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan manajemen dan kepemimpinan, serta fungsional non ilmu hayat pertanian;
- g. Melakukan pengembangan teknik pelatihan manajemen dan kepemimpinan dan multimedia pertanian, serta fungsional non ilmu hayat pertanian;
- h. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lingkungan Strategis Organisasi

Lingkungan strategis organisasi PPMKP terdiri dari lingkungan strategis internal dan eksternal, baik yang bersifat positif maupun negatif. Berdasarkan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunities* dan *Threats*), lingkungan strategis PPMKP dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kekuatan (Strength), meliputi:
 - a. Letak geografis PPMKP yang strategis, dengan didukung kondisi dan lingkungan alam yang nyaman;



- Kelembagaan PPMKP memiliki struktur organisasi yang handal dan memiliki pengalaman dalam melaksanakan tupoksinya;
- Jumlah aparatur PPMKP terdiri dari 217 orang pegawai PNS;
- d. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai dan modern;
- e. Dukungan anggaran yang memadai;
- f. Telah mendapatkan ISO 9001:2008, sehingga dapat meningkatkan peluang dalam menjalin kerjasama dan kemitraan.

2) Kelemahan (Weakenesses), meliputi:

- a. Pengembangan sarana dan prasarana belum sejalan dengan perkembangan jumlah peserta diklat (contoh : tempat tidur, komputer dan peralatan alat pengolah data, dll) masih belum memadai;
- Belum dapat menerapkan sepenuhnya standar pelatihan sesuai ISO9001:2008;
- c. Belum tersedianya petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- d. Belum terlaksananya operasional kegiatan sesuai dengan prosedur/ SOP;
- e. Belum meratanya kualitas dan kompetensi SDM Aparatur (mengingat latar belakang pendidikan dan pengalaman) dalam pengembangan profesionalisme petugas;
- f. Belum terakreditasinya beberapa jenis pelatihan yang menjadi andalan kegiatan PPMKP.



3) Peluang (Opportunities), meliputi:

- a. PPMKP merupakan satu satunya pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pelatihan manajemen dan kepemimpinan di lingkup Kementerian Pertanian;
- Keberadaan lembaga lembaga pendidikan, pelatihan, maupun penyuluhan pertanian di daerah milik petani yang mendukung pelaksanaan pengembangan SDM pertanian seperti : Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan (P4S), Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3);
- c. Keberadaan petugas dan penyuluh pertanian di daerah seperti Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Honorer, Penyuluh Swadaya dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);
- d. Dukungan atau sharing pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian;
- e. Peningkatan kemampuan swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian di wilayahnya;
- f. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dalam menunjang kegiatan pelatihan;
- g. Adanya pembinaan dalam pelaksanaan pelatihan dengan bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara maupun dengan Kementerian Keuangan.



- 4) Tantangan/ ancaman (Threats), meliputi:
 - a. Kualitas sebagian besar SDM pertanian (petani) yang masih rendah, terutama dari segi pendidikan formal;
 - b. Lemahnya aksesibilitas petani pada lembaga permodalan, lembaga penyedia sarana produksi, lembaga pemasaran dan sumber/teknologi;
 - c. Kemiskinan, pengangguran, dan penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian;
 - d. Menurunnya kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Stratejik (Renstra)

Dalam menyelenggarakan kegiatannya, PPMKP telah menyusun rencana strategis periode tahun 2010 – 2014. Renstra ini disusun sebagai pedoman instansi dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengacu pada Renstra BPPSDMP, serta dengan memperhatikan lingkungan strategis organisasi.

Visi

Perumusan visi dilakukan terutama dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi organisasi dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis dan isu global. Visi PPMKP dirumuskan sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pelatihan yang Menghasilkan Pemimpin dan Pengelola Pertanian yang Profesional, Kreatif, Inovatif, dan Berwawasan Global

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (UU No. 25 Tahun 2004). Misi juga didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/ akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu dekat (waktu perencanaan). Misi lebih terkonsentrasi untuk waktu sekarang dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang dikaitkan dengan pelayanan, proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan.



Berdasarkan visi yang ada, maka dirumuskan misi PPMKP adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan mengembangkan kerjasama diklat manajemen dan kepemimpinan pertanian;
- 2) Menyelenggarakan pelatihan manajemen;
- 3) Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan;
- 4) Menyelenggarakan pelatihan multi media pertanian;
- 5) Menyelenggarakan pelatihan fungsional non RIHP;
- 6) Menyelenggarakan produksi dan penyebaran informasi pertanian;
- 7) Menyelenggarakan sistem pengawasan internal;
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kediklatan;
- 9) Melaksanakan pengembangan laboratorium manajemen dan kepemimpinan.

3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi PPMKP yang telah ditetapkan, maka rumusan tujuan kegiatan PPMKP untuk periode 2010 – 2014, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas manajemen kelembagaan PPMKP.
- 2) Mewujudkan pemimpin dan pengelola pertanian yang profesional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global.
- Meningkatkan produktivitas, efektivitas, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan manajemen, kepemimpinan, multimedia serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian.



- 4) Mengembangkan jejaring kerjasama diklat pertanian dengan lembaga-lembaga diklat lainnya (pemerintah, petani dan swasta).
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana PPMKP.
- 6) Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur PPMKP.

4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai PPMKP periode 2010 – 2014 dibagi menjadi tiga tahapan yaitu Tahap Pemantapan, Tahap Pengembangan, dan Tahap Pemberdayaan, dengan masing-masing indikator kinerja yang dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran dan Indikator Kinerja PPMKP Tahun 2010 - 2014

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Tahap Pemantapan	
	Pemantapan Kelembagaan	 Tersedianya 1 (satu) paket SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) PPMKP; Terlaksananya kegiatan Sistem Pengendalian Internal PPMKP melalui terbentuknya 1 (satu) Tim SPI, tersedianya 1 (satu) Juklak dan 1 (satu) Juknis, serta tersedianya 2 (dua) laporan per tahun; Terlaksananya 1 (satu) paket Sistem Monitoring dan Evaluasi; Tersedianya 2 (dua) laporan kelembagaan per tahun.
	Pemantapan Ketenagaan	 Terlatihnya 7.625 orang aparatur pertanian melalui Diklat Kepemimpinan; Terlatihnya 5.450 orang melalui pelatihan manajemen; Terlatihnya 3.090 orang melalui pelatihan multimedia;



No.	Sasaran	Indikator Kinerja
		Terselenggaranya pengembangan kompetensi, spesialisasi dan profesi bagi tenaga fungsional sebanyak 150 orang;
		 Terbinanya tenaga struktural dan staf di bidang kepegawaian/ administrasi/ keuangan/ perlengkapan dan SPI sebanyak 1.400 orang;
		6. Terlaksananya kegiatan pendidikan formal dan non formal dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme bagi pejabat dan
		staf struktural sebanyak 255 orang.
	Pemantapan Penyelenggaraan	Terselenggaranya pelatihan 180 angkatan diklat manajemen, 200 angkatan diklat kepemimpinan, 135 angkatan diklat multimedia dan fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian berbasis kompetensi;
		 Tersusunnya 5 (lima) kurikulum pelatihan manajemen, 5 (lima) kurikulum pelatihan multimedia, dan fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
		3. Tersusunnya 5 modul pelatihan manajemen, 5 modul multimedia, serta fungsional non Rumpun Ilmu Hayat Pertanian;
		4. Terlaksananya 13 kegiatan Identifikasi Kebutuhan Latihan (IKL) dan 10 Analisis Kebutuhan Latihan (AKL);
		 Tersedianya 335 instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan (akuntabilitas kinerja PPMKP Ciawi);
		6. Terlaksananya 10 kali kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan/ pasca diklat;
		7. Terselenggaranya 23.400 jam siaran
		produksi informasi pertanian;
		8. Tersedianya penyebaran informasi pertanian melalui penerbitan majalah sebanyak 10 volume, leaflet sebanyak 20 volume, dan melalui website PPMKP;
		Tersusunnya 335 laporan penyelenggaraan diklat.



No.	Sasaran	Indikator Kinerja
	Pemantapan Jejaring Kerjasama	Terselenggaranya 220 kegiatan kerjasama pelatihan dengan lembaga lain (pemerintah, petani, dan swasta);
		Tersedianya 20 proposal pelatihan kepemimpinan, manajemen dan multimedia;
		3. Tersedianya 35 orang tenaga fungsional pertanian sebagai fasilitator pada pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan multimedia dengan instansi lain;
		Terlaksananya 10 paket koordinasi dengan pihak-pihak eksternal yang menjadi mitra kerjasama PPMKP.
	Pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat dan kantor PPMKP	1. Tersedianya 5 (lima) paket pengadaan sarana, 5 (lima) paket pemeliharaan, 2 (dua) paket penghapusan sarana kantor, 3 (tiga) paket pengadaan prasarana kantor, 5 (lima) paket pemeliharaan, dan 2 (dua) paket penghapusan prasarana kantor;
		Terlaksananya 1 (satu) paket penataan aset- aset Barang Milik Negara PPMKP.
2.	Tahap Pengembangan	
	Pengembangan Kelembagaan	Tersedianya 2 (dua) paket profil kelembagaan
		 Peningkatan 5 (lima) paket koordinasi eksternal dengan pihak-pihak eksternal yang menjadi mitra kerjasama PPMKP.
	Pengembangan Ketenagaan	Peningkatan etika pejabat struktural, fungsional, dan pejabat teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebanyak 5 (lima) kali/ paket;
		 Peningkatan profesionalisme pejabat struktural, fungsional, dan pejabat teknis sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya sebanyak 5 (lima) kali/ paket;
		 Penataan wewenang dan tanggung jawab antara petugas struktural, fungsional, dan pejabat teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;



No.	Sasaran	Inc	Indikator Kinerja				
		4.	Tersedianya 20 orang tenaga fungsional dan 25 orang tenaga teknis sebagai tuntutan tugas dan pokok PPMKP;				
		5.	Peningkatan Kompetensi 26 orang Pejabat Fungsional untuk dapat melaksanakan diklat-diklat unggulan dengan mengikuti diklat khusus (TOT) dengan lembaga diklat terkait;				
		6.	Terciptanya 5 (lima) paket kegiatan penumbuhan rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang harmonis antara sesama karyawan PPMKP.				
	Pengembangan Penyelenggaraan	1.	Tersusunnya 2 (dua) paket standar kompetensi kerja kepemimpinan pertanian dan fungsional pertanian;				
		2.	Terakreditasinya 5 (lima) diklat unggulan PPMKP Ciawi;				
		3.	Terselenggaranya 5 (lima) paket bimbingan lanjutan untuk purnawidya diklat tertentu;				
		4.	Tersempurnakannya 10 kurikulum pada diklat tertentu untuk disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan dan perkembangan jaman;				
		5.	Tersusunnya 3 (tiga) paket model pengembangan pelatihan kepemimpinan dan manajemen;				
		6.	Terselenggaranya diklat-diklat untuk pengelola P4S dan LM3;				
		7.	Terselenggaranya pengembangan 1 (satu) Pusat Inkubator Agribisnis (PIA);				
		8.	Terbinanya 30 lokasi Standarisasi dan Akreditasi P4S;				
		9.	Tersedianya 5 (lima) paket data base diklat.				
	Pengembangan Kerjasama	1.	Terpromosikannya dan terpublikasikannya 20 jenis pelatihan kepemimpinan dan manajemen terutama yang sudah terakreditasi;				
		2.	Terbangunnya jejaring kerjasama pemanfaatan 35 tenaga fungsional sebagai				



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	
		pengajar dalam penyelenggaraan diklat dengan lembaga-lembaga diklat (pemerintah, petani, dan swasta) dengan prinsip mitra kerja sejajar;	
		 Tersedianya 5 (lima) paket brosur/ leaflet fasilitas sarana dan prasarana lembaga PPMKP dan website PPMKP. 	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana	 Tersedianya 2 (dua) paket software laboratorium kepemimpinan dan manajemen; 	
		Penambahan 2 (dua) paket sarana outbound;	
		Penambahan 1 (satu) paket perangkat hot spot di komplek PPMKP.	
3.	Tahap Pemberdayaan	Terlatihnya 1.150 Orang dari LM3, Gapoktan, P4S, dan masyarakat tani;	
		Penyaluran 3 (tiga) paket bantuan sosial untuk P4S/ LM3/ PUAP;	
		Terlaksananya 5 (lima) paket bimbingan lanjutan bagi P4S/LM3;	
		Terlaksananya 30 lokasi pembinaan standarisasi dan akreditasi P4S.	

Selanjutnya, mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014, PPMKP menyusun Rencana Kinerja Tahunan dengan masing-masing indikator kinerja bersifat output untuk setiap tahun pelaksanaan. Seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional PPMKP sepenuhnya mengacu pada Rencana Kerja PPMKP Tahun 2010 - 2014 seperti tertuang dalam Tabel 1.



Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2010 – 2014

Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi – Bogor

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun				
NO.	Jasaran Strategis	mulkator Kinerja		2011	2012	2013	2014	
1.	Tertatanya Kelembagaan Pelatihan Pertanian	Jumlah Program Pelatihan yang Terakreditasi	1 diklat					
		Jumlah Lembaga PIA yang Difasilitasi	-	4 paket	-	-	-	
		Jumlah P4S yang Terstandarisasi dan Terklasifikasi Kelembagaannya	6 unit					
		PPMKP Mendapat Sertifikasi ISO	-	1 paket	-	-	-	
		5. Jumlah Profil PPMKP yang Disusun	2 paket					
		Jumlah Database Diklat yang Disusun	1 paket					
		7. Jumlah Diklat Profesi yang Dilaksanakan	-	1 paket	-	-	-	
		Jumlah Software Laboratorium yang Tersedia	1 paket					



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun					
	Jasaran Strategis	mulkator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	
2.	Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Tenaga Kediklatan yang Ditingkatkan Profesionalismenya	1 paket					
		Jumlah Tenaga Fungsional Widyasiwara yang Ditingkatkan Profesionalimenya	1 paket					
3.	Terlatihnya Aparatur Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi Kerja dan Non	Jumlah Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya	103 angkatan	103 angkatan	103 angkatan	103 angkatan	103 angkatan	
	Aparatur Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Non Aparatur Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya	230 orang	230 orang	230 orang	230 orang	230 orang	
4.	Tersusunnya Dokumen: Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan (NSPK)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Kegiatan	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	
		Jumlah Proposal Pelatihan, Kepemimpinan , Manajemen, dan Multimedia yang Disusun	4 paket					
		Jumlah Laporan Kelembagaan yang Disusun	2 laporan					
		4. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Diklat yang Disusun	67 laporan	67 laporan	67 laporan	67 laporan	67 laporan	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
	Jasaran Grategis	indikator Kinerja		2011	2012	2013	2014
		5. Jumlah Paket Koordinasi dengan Pihak – pihak Eksternal yang Menjadi Mitra Kerjasama PPMKP yang Dilaksanakan dan Dikembangkan	3 paket				
		Jumlah Istrument Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (Akuntabilitas Kinerja PPMKP) yang Dilaksanakan	37 instrumen	37 instrumen	37 instrumen	37 instrumen	37 instrumen
		7. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang Dilaksanakan	2 laporan				
		8. Jumlah Kegiatan Pasca Diklat yang Dilaksanakan	2 laporan				
		Jumlah Jam Siaran Produksi Informasi Pertanian yang Dilaksanakan	6000 jam siaran				
		10. Jumlah Juklak, Juknis, Modul, Materi, Bahan Ajar, dan Kurikulum yang Disusun dan Disempurnakan	7 modul				
		11. Jumlah Sarana Informasi Pertanian (Media Cetak) yang Dipromosikan dan Dipublikasikan	3 edisi				



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun				
	Jasaran Strategis	indikator Kinerja	2010	2011	2012	2013	2014	
		12. Jumlah Kegiatan IKL, AKL, Binjut Pelatihan yang Terlaksana	5 paket	5 paket	5 paket	4 paket	4 paket	
		13. Jumlah Tim SPI yang Dibentuk & Dilaksanakan	1 tim					
		14. Jumlah SOP yang Tersediia	-	1 paket	-	-	-	
5.	Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12 bulan					



B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dari dokumen Renstra Tahun 2010 – 2014, dapat dlihat Rencana Kerja PPMKP per tahun dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karenanya, dokumen Renstra secara ideal dapat berperan sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan yang dinilai strategis dalam memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi PPMKP. Tabel 2.3. berikut menyajikan Rencana Kinerja PPMKP Tahun 2013 yang dimuat dalam Rencana Operasional Kegiatan ROK Tahun 2013.



Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Unit Eselon I : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Unit Eselon II/Unit Kerja Mandiri K/L : Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Tahun : T.A. 2013

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian	126 orang
		Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kepemimpinan pertanian	1680 orang
		Jumlah non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan pertanian	660 orang
2.	Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi	Jumlah widyaiswara dan staf yang ditingkatkan profesionalismenya	122 orang
	dan dikembangkan	Jumlah widyaiswara yang ditingkatkan kompetensi dan spesialisasinya	30 orang



	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		3. Jumlah pengelola P4S kelas utama yang dimagangkan	30 orang
3.	Terfasilitasinya kelembagaan pelatihan pertanian	Jumlah Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	1 unit
		2. Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi	22 unit
4.	Tersusunnya dokumen Norma Standar Pedoman dan kebijakan	Jumlah dokumen program dan kerjasama yang dihasilkan	3 dokumen
	(NSPK)	Jumlah dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dihasilkan	3 dokumen
		3. Jumlah dokumen ketenagaan pelatihan pertanian yang dihasilkan	1 dokumen
		4. Jumlah dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan	3 dokumen
5.	Terfasilitasinya pelayanan perkantoran	Jumlah layanan perkantoran	12 bulan

Sumber : Rencana Kerja Operasional (ROK) tahun 2013



C. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah dokumen pernyataan kinerja atau kesepatakan kinerja yang merupakan perjanjian antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Penyusunan penetapan kinerja dilakukan sesaat setelah DIPA turun (untuk kemudian DIPA tersebut digunakan sebagai lampiran dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pada tahun bersangkutan). Pada bulan April 2013, dokumen Penetapan Kinerja resmi ditandatangani (Tabel 2.4.). Penetapan Kinerja PPMKP Tahun 2013 merupakan pengesahan dari dokumen Rencana Kinerja PPMKP Tahun 2013 yang dilengkapi dengan satuan jumlah anggaran pada tahun yang bersangkutan.



Tabel 2.4. Penetapan Kinerja

Unit Eselon I : Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Unit Eselon II/Unit Kerja Mandiri K/L: Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Tahun Anggaran : T.A. 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian	> Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.806 orang
reitallati	> Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	660 orang
Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Maningkatkan Kannatansi	> Jumlah Ketenagaan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan	182 orang
Meningkatkan Kompetensi	Jumlah widyaiswara yang difasilitasi dan dikembangkan	152 orang
	Jumlah tenaga teknis kediklatan yang difasilitasi dan dikembangkan	30 orang
	3. Jumlah instruktur P4S yang difasilitasi dan dikembangkan	
Terfasilitasinya Kelembagaan Pelatihan Pertanian untuk meingkatkan kompetensi	Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat yang difasilitasi dan dikembangkan	1 unit



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	 Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya 	22 Unit
Tersusunnya Dokumen: Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan (NSPK)	 Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Organisasi dan Kepegawaian, serta Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian 	10 dokumen
5. Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	> Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12 bulan

Jumlah Anggaran :

Kegiatan: Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian: Rp. 35.477.037.000,00

Jakarta, April 2013

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

Kepala Pusat Pelatihan dan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Dr. Ir. Achmad Suryana, M.S.

NIP. 19540722 197901 1 001

Ir. Kemal Mahfud, MM

NIP. 19610225 198903 1 001



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Dalam melaporkan kinerja, instansi pemerintah perlu mengetahui tingkat capaian kinerjanya selama setahun, oleh karenanya perlu adanya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan demi tercapainya visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja antara rencana yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur perencanaan, yang menjadi materi utama untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja sebuah instansi mencapai target sasaran.

Namun pada prakteknya, DIPA mengalami beberapa kali revisi pada setiap tahunnya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pengukuran capaian kinerja. Oleh sebab itu, pada tahun 2013, PPMKP juga melakukan penyesuaian dengan dokumen DIPA revisi ketujuh, tertanggal 02 Desember 2013 sebagai bahan akuntabilitas anggaran. Pada Tabel 3.1 akan digambarkan Hasil Pengukuran Kinerja PPMKP Tahun 2013 berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2013.



Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja

Unit Eselon II/Unit Kerja Mandiri K/L : Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian

Tahun : T.A. 2013

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian	Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	1.806 orang	1.460 orang	80.84
		Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya	660 orang	691 orang	104.70
		Capaian Kinerja Sasaran 1			92.77
2.	Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi	Jumlah Ketenagaan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan			
		Jumlah widyaiswara yang difasilitasi dan dikembangkan	152 orang	152 orang	100
		Jumlah tenaga teknis kediklatan yang difasilitasi dan dikembangkan	30 orang	30 orang	100



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Jumlah instruktur P4S yang difasilitasi dan dikembangkan	-	-	-
	Capaian Kinerja Sasa	ran 2		100
Terfasilitasinya Kelembagaan Pelatihan Pertanian untuk meingkatkan kompetensi	Jumlah kelembagaan pelatihan UPT Pusat yang difasilitasi dan dikembangkan	1 unit	1 unit	100
	Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbina dan terklasifikasi kelembagaannya	22 Unit	22 unit	100
	Capaian Kinerja Sasa	ran 3		100
4. Tersusunnya Dokumen: Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan (NSPK)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Organisasi dan Kepegawaian, serta Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	10 dokumen	10 dokumen	100
	Capaian Kinerja Sasaran 4			100



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Terlaksananya Pelayanan Perkantoran	Jumlah waktu pelaksanaan Pelayanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100
	Capaian Kinerja Sasaran 5		100	
Capaian Kinerja Total			98.55	

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 (disesuaikan revisi DIPA ke-7 tanggal 02 Desember 2013) : Rp. 33.775.161.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp. 32.423.910.539,00



B. Perkembangan Pencapaian Kinerja Sasaran

Pencapaian kinerja sasaran strategis Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi – Bogor sampai dengan Desember Tahun 2013 mencapai **98.55** %. Berikut adalah pencapaian sasaran kinerja berdasarkan 5 (lima) sasaran strategis yang tertera dalam dokumen Penetapan Kinerja, yaitu:

- 1. Pencapaian kinerja "Meningkatnya kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian" mencapai 92.77 %;
- Pencapaian kinerja pada sasaran "Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi" mencapai 100 %;
- 3. Pencapaian kinerja pada sasaran "Terfasilitasinya kelembagaan pelatihan pertanian" mencapai 100 %;
- 4. Pencapaian kinerja pada sasaran "Tersusunnya Dokumen, Norma, Standar Pedoman dan Kebijakan (NSPK)" mencapai 100 %;
- 5. Pencapaian kinerja pada sasaran "Terfasilitasinya pelayanan perkantoran" mencapai 100 %

Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja PPMKP, maka ditetapkanlah skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

AA В CC С D Α AGAK MEMUASKAN **SANGAT BAIK** BAIK **CUKUP BAIK** KURANG KURANG > 85% - 100% > 75% - 85% > 65% - 75% > 50% - 65% > 30% - 50% 0% - 30%

Tabel 3.2. Skala Pengukuran Kinerja

Nilai 98.55 % untuk pencapaian total kinerja sasaran strategis menunjukkan bahwa pada tahun 2013, PPMKP berhasil mencapai target kinerja secara **Memuaskan**. Bahkan dalam pencapaian masing-masing



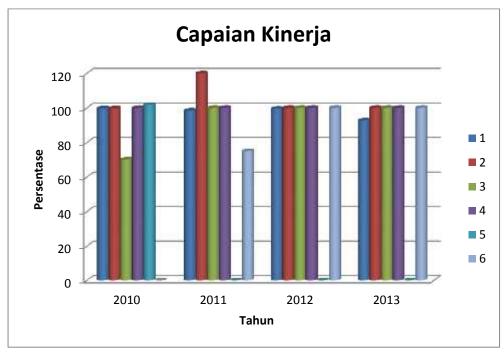
sasaran dapat memperoleh kisaran 92.77 % - 100 % yang berarti semua sasaran dapat dicapai secara memuaskan.

Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja untuk 4 (empat) tahun yang telah lampau yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2013, pencapaian kinerja Tahun 2013 cenderung menurun pada sasaran kinerja "Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur". Tabel 3.3. di bawah ini menjelaskan dinamika pencapaian target kinerja sasaran PPMKP tahun 2010 - 2013.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran PPMKP

No.	Sasaran	Tah	nun		
		2010	2011	2012	2013
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian (Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian)	99.75	98.45	99.49	92.77
2	Meningkatnya Kelembagaan (Terfasilitasinya Kelembagaan Pelatihan Pertanian untuk meningkatkan kompetensi)	99.7	120	100	100
3	Meningkatnya Ketenagaan (Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi)	70.18	100	100	100
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana (<i>Terlaksananya</i> <i>Pelayanan Perkantoran</i>)	99.94	100	100	100
5	Peningkatan Jejaring Kerjasama	101.76	-	-	-
6	Tersusunnya Dokumen: Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan (NSPK)	-	75	100	100





Gambar 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2010 s.d. 2013

Keterangan Gambar:

- 1. Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian (Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian)
- 2. Meningkatnya Kelembagaan (Terfasilitasinya Kelembagaan Pelatihan Pertanian untuk meningkatkan kompetensi)
- 3. Meningkatnya Ketenagaan (Terfasilitasinya Ketenagaan Pelatihan Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi)



- 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana (Terlaksananya Pelayanan Perkantoran)
- 5. Peningkatan Jejaring Kerjasama
- 6. Pengembangan Kegiatan Khusus
- 7. Tersusunnya Dokumen: Norma, Standar, Pedoman, dan Kebijakan (NSPK)

Satu sasaran yang tidak dapat mencapai realisasi 100% adalah sasaran pertama ("Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian") mencapai 92.77%. Hal ini dikarenakan indikator kinerja "Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya" tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebesar 1.806 orang. Terdapat selisih 346 orang yang tidak dapat direalisir, 339 orang di antaranya merupakan dampak dari penghematan APBN (revisi kedua dan ketiga) sehingga anggaran tidak mencukupi untuk melatih sejumlah 339 orang tersebut. Sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya tidak dapat menghadiri diklat oleh karena adanya alasan pribadi.

Sebaliknya, pada indikator kinerja "Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya" justru mencapai 691 orang (104.70%), melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak 660 orang. Hal ini disebabkan oleh optimalisasi anggaran pelatihan, dengan menyerap melalui penyelenggaraan Pelatihan anggaran Pemberdayaan bagi Kelompok Tani sebanyak 60 orang peserta, pada revisi DIPA ketiga pada tanggal 23 Juli 2013. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian target kinerja Diklat Pemantapan Magang Jepang yang seharusnya 60 orang, namun hanya dicapai 33 orang (55 %). Hal ini dikarenakan oleh persyaratan calon peserta Diklat Pemantapan Magang Jepang yang mewajibkan peserta untuk terlebih dulu lulus praseleksi dalam Diklat Orientasi Magang Jepang di BPPD Ketindan Tahun Anggaran 2013.

Dari segi *output*, secara garis besar PPMKP telah berhasil mencapai target kinerja dengan memuaskan, melatih 92.77 % peserta aparatur dan non aparatur, serta tenaga fungsional yang telah ditargetkan. Disamping mengukur *output*, PPMKP juga mencoba



mengukur *outcome* kegiatan pelatihan sebagai upaya untuk menilai kualitas penyelenggaraan diklat tahun sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengukur hasil diklat yang telah diselenggarakan serta untuk mengendalikan mutu diklat pada tahun ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPMKP melaksanakan evaluasi pasca diklat sebagai salah satu alat untuk mengukur *outcome*. Dengan mengukur *outcome*, PPMKP dapat mengetahui sejauh mana pelatihan dapat menjadi faktor pendukung terhadap perubahan positif pada purnawidya setelah kembali ke tempat kerja. Tabel 3.4. menjelaskan beberapa *outcome* dari evaluasi pasca diklat yang telah dilaksanakan oleh PPMKP pada tahun 2013 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Hasil Evaluasi Pasca Diklat Tahun 2013

No	Nama	Outcome		Sud Pandai Atasan	ng (%)
110	Kegiatan		Guideinio		Rekan Kerja
1	Diklat	a.	Peningkatan motivasi kerja	91.67	85.00
	Teknis Display	b.	Peningkatan produktivitas kerja	91.67	80.00
	Pameran	C.	Peningkatan kreativitas kerja	91.67	85.00
	bagi Penyuluh	d.	Peningkatan perubahan sikap	90.00	80.00
	Pertanian		Peningkatkan menyampaikan laporan hasil	75.00	87.50
		f.	Peningkatan penugasan sesuai dengan peningkatan ilmu	85.00	80.00
		g.	Peningkatan dukungan instansi	90.00	87.50
2	Diklat	a.	Peningkatan motivasi kerja	85.00	80.00
	Teknis Arsiparis		Peningkatan produktivitas kerja	75.00	85.00
	bagi Petugas	C.	Peningkatan kreativitas kerja	70.00	
Lingkup		d.	Peningkatan perubahan sikap	85.00	80.00
	Kementerian Pertanian	e.	Peningkatkan menyampaikan laporan hasil	90.00	85.00
		f.	Peningkatan penugasan sesuai dengan peningkatan ilmu	70.00	85.00



	Nama			Suc	
No	Nama Kogiatan		Outcome	Panda	ng (%) Rekan
	Kegiatan			Atasan	Kerja
		g.	Peningkatan dukungan instansi	80.00	85.00
3	Diklat	a.	Peningkatan motivasi kerja	91.67	90.00
	Kapasitasi bagi	b.	Peningkatan produktivitas kerja	91.67	85.00
	Penyuluh Pendamping		Peningkatan kreativitas kerja	91.67	90.00
			Peningkatan perubahan sikap	92.00	85.00
	(THL)	e.	Peningkatkan penerapan hasil pelatihan	85.00	
		f.	Peningkatan penugasan sesuai dengan peningkatan ilmu	90.00	85.00
		g.	Peningkatan dukungan instansi	90.00	91.67
4	Diklat	a.	Peningkatan motivasi kerja		80.00
	Kepemimpin an		Peningkatan produktivitas kerja		85.00
	Agribisnis	C.	Peningkatan kreativitas kerja		75.00
	bagi Petani	d.	Peningkatan perubahan sikap		80.00
		e.	Peningkatan penerapan hasil pelatihan		85.00
		f.	Peningkatan dukungan gapoktan		63.64
5 Diklat		a.	Peningkatan motivasi kerja		80.00
	Kewirausah aan	b.	Peningkatan produktivitas kerja		75.00
	Agribisnis	C.	Peningkatan kreativitas kerja		75.00
	bagi Petani Muda	d.	Peningkatan perubahan sikap		70.00
		e.	Peningkatan penerapan hasil pelatihan		85.00
		f.	Peningkatan dukungan gapoktan		85.00
6	Diklat Audio	a.	Peningkatan motivasi kerja	92.90	85.00
	Visual bagi Penyuluh	b.	Peningkatan produktivitas kerja	92.90	80.00
	Pertanian	C.	Peningkatan kreativitas kerja	70.00	75.00
			Peningkatan perubahan sikap	85.00	85.00
		e.	Peningkatkan penerapan hasil pelatihan	80.00	
		f.	Peningkatan penugasan sesuai dengan peningkatan ilmu	70.00	80.00
		g.	Peningkatan dukungan instansi	85.00	80.00



Dari hasil evaluasi pasca diklat yang diselenggarakan, secara umum PPMKP telah ikut berkontribusi dalam peningkatan kemampuan kerja purnawidya di tempat kerjanya masing - masing. Peningkatan kreativitas kerja menjadi poin khusus yang perlu diperhatikan oleh fasilitator dalam mengajar. Karena hasil evaluasi pasca diklat menunjukkan rata – rata atasan dan/ atau rekan kerja menilai 70 – 75 % untuk peningkatan kreativitas purnawidya di dalam pelaksanaan tugasnya. Dukungan kurikulum diklat juga berperan penting dalam menciptakan kreativitas peserta, sehingga perencanaan diklat harus disiapkan secara matang.

Dengan peningkatan kreativitas purnawidya, diharapkan diklat mampu berpengaruh nyata dalam peningkatan kecakapan purnawidya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di tempat kerjanya, sekaligus memicu tingginya tingkat capaian kinerja (khususnya *outcome*) PPMKP.

C. Akuntabilitas Keuangan

Adanya revisi DIPA ketujuh mengenai pengurangan anggaran yang disebabkan oleh adanya penghematan APBN, kaitannya dengan kenaikan bahan bakar minyak nasional menyebabkan anggaran PPMKP berkurang sebanyak Rp.2.068.399.000,00. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi capaian target keuangan. Oleh karenanya, dilakukan penyesuaian dalam mengukur capaian target dengan membandingkan antara realisasi dengan anggaran DIPA setelah revisi terakhir (tanggal 02 Desember 2013). Dengan demikian dapat diketahui realisasi penyerapan anggaran PPMKP Tahun 2013 berhasil mencapai 96 %. Kurangnya capaian target tersebut, disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak mencapai 80 %, yaitu pada kegiatan Sistem Pengendalian Internal (SPI)/ Pembinaan Anti Korupsi (68.44%). Hal ini disebabkan oleh anggaran untuk ATK tidak dapat diserap karena



pengelolaan kegiatan menggunakan anggaran operasional perkantoran.

Jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, tahun 2013 merupakan titik terendah dalam penyerapan anggaran. Tabel 3.3 berikut menampilkan perbandingan serapan anggaran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 3.5. Perkembangan Realiasasi Serapan Anggaran PPMKP Tahun 2010 s.d 2013

Tahun	Pagu (Rp.)	Realiasasi (Rp.)	Realisasi (%)
2010	29.395.310.000	29.008.723.547	98,68 %
2011	32.708.772.000	31.758.754.038	97,10 %
2012	35.820.519.000	35.055.964.830	97.87 %
2013	33.775.161.000	32.423910.539	96.00 %

D. Analisis Efisiensi Capaian Indikator Kinerja

Efisiensi capaian indikator kinerja dapat dilihat dari perbandingan proporsi antara besarnya capaian indikator kinerja sasaran yang diperoleh dengan besarnya masukan/ input yang digunakan (proporsi output/ input). Efisiensi terjadi apabila nilai rasio ouput dibandingkan dengan input mencapai 1 atau lebih dari 1.

Perbandingan proporsi capaian global indikator kinerja sasaran PPMKP dengan input yang digunakan pada tahun 2013 adalah 98.55% berbanding 96%. Dengan demikian nilai efisiensi yang diperoleh adalah 1.03. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa capaian yang diperoleh PPMKP termasuk ke dalam kategori **efisien**.

Tingginya nilai efisiensi PPMKP dalam menjaga *performance* (kinerja) instansi, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh instansi (anggaran yang



tersedia, sumber daya manusia yang cukup memadai dalam menyelenggarakan pelatihan, serta sarana dan prasarana yang mendukung).

Namun demikian, revisi DIPA sebanyak 7 (tujuh) kali dalam Tahun Anggaran 2013, mengakibatkan beberapa perubahan penting pada jumlah *output* yang dihasilkan, jenis kegiatan, jadual pelaksanaan, dan dokumen - dokumen lainnya. Meskipun pengurangan anggaran berpengaruh terhadap capaian *output*, namun di lain sisi, revisi DIPA juga merupakan cara untuk memanfaatkan anggaran yang tersisa secara optimal, dengan menyelaraskan kebijakan pusat dan kebutuhan PPMKP.

Dalam pepenyusunan LAKIP Tahun 2013, dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2013 kurang sesuai dengan Rencana Stratejik Tahun 2010 – 2014, sehingga Rencana Strategis tidak lagi menjadi acuan pembuatan rencana kinerja tahunan. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan program-program di tahun mendatang PPMKP perlu memperhatikan beberapa agenda penting berikut:

- Penyempurnaan dokumen pendukung (Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja) sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang berlangsung secara dinamis;
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi internal supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara solid, terintegrasi, dan berkesinambungan; serta agar penyerapan anggaran dapat terealisasi dengan optimal;
- 3. Peningkatan fungsi Identifikasi Kebutuhan Latihan untuk meningkatkan kualitas kurikulum pelatihan;
- 4. Optimalisasi fungsi evaluasi penyelenggaraan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan;
- Peningkatan ketertiban dan ketepatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.



BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahn (LAKIP) PPMKP Tahun 2013 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala PPMKP kepada pimpinan lembaga, dalam hal ini adalah Kepala BPPSDMP, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi PPMKP selama tahun 2013, PPMKP mengukur tingkat capaian 5 (lima) sasaran strategis yang telah disepakati oleh Kepala BPPSDMP dan Kepala PPMKP dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 ke dalam dokumen LAKIP Tahun 2013. Dari pengukuran tersebut diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis PPMKP sampai dengan akhir tahun 2013 secara global mencapai 98.55 %, dengan kisaran antara 92.77% sampai dengan 100 %. Sedangkan realisasi serapan anggaran mencapai 96 % atau sebesar Rp.32.423.910.539,- dari total pagu anggaran sebesar Rp.33.775.161.000,-. Hasil analisa efisiensi capaian indikator kinerja PPMKP pada tahun 2013 menunjukkan nilai yang efisien (lebih dari 1), yaitu 1.03.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PPMKP pada selama 2013 adalah tidak tercapainya indikator kinerja *output* peserta diklat dan adanya 7 (tujuh) kali revisi DIPA yang menyebabkan perubahan anggaran dan *output* sehingga berdampak pada turunnya capaian kinerja instansi.

Menindaklanjuti permasalahan mengenai pencapaian target *output*, maka langkah antisipasi yang dapat dilakukan pada tahun yang akan datang adalah segera menyempurnakan dokumen pendukung sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang berlangsung; meningkatkan koordinasi



dan komunikasi internal supaya pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara solid, terintegrasi, dan berkesinambungan; serta agar penyerapan anggaran dapat terealisasi dengan optimal; meningkatkan fungsi Identifikasi Kebutuhan Latihan untuk meningkatkan kualitas kurikulum pelatihan; mengoptimalkan fungsi evaluasi penyelenggaraan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelatihan; meningkatkan ketertiban dan ketepatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan di masa yang akan datang, disertai dengan antisipasi permasalahan yang sama di tahun mendatang, diharapkan PPMKP mampu meningkatkan capaian kinerja di tahun 2014.